



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025



KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNG KIDUL



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang -undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 55)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Thn 2018 No. 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);

24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
26. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
32. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 3);

33. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 4);
34. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 9);
35. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO

dan

LURAH SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sejumlah Rp. 4.485.368.531,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp.4.527.326.430,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | Rp.4.485.368.531,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp.41.957.899,00 |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp.58.042.101,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp.100.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | (Rp.41.957.899,00) |

SILPA tahun anggaran berjalan

-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- A. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- B. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- C. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- D. Kegiatan pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - 1) bukan merupakan kegiatan normal dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - 3) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa/ permasalahan sosial; dan

5) berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- A. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- B. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- C. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/ atau
- D. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sidoharjo

Ditetapkan di Sidoharjo

pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Sidoharjo
pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HERU EKO SUSILO'.

HERU EKO SUSILO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 119.959.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 4.357.857.430,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 39.500.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 4.527.326.430,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 907.593.356,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.995.030.175,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 1.430.505.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 152.240.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 4.485.368.531,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 41.957.899,00 | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 58.042.101,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 58.042.101,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | (41.957.899,00) | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 119.959.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 4.367.867.430,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 39.500.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 4.527.326.430,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>2.033.138.229,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1.145.621.913,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 46.800.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 46.800.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 741.014.600,00 | ADD, PBH |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 741.014.600,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 51.580.976,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 51.580.976,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 152.945.517,00 | ADD, PBH, PBP |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 152.945.517,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 67.600.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 67.600.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mekan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 8.812.780,00 | ADD, PBH |
| 1.1.06 | 5.1. | Belanja Pegawai | 597.780,00 | |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.215.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 41.318.040,00 | ADD, PBH |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.318.040,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 35.450.000,00 | DOS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.450.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 29.670.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 1.100.000,00 | PAD |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 1.100.000,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 3.700.000,00 | PBH |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.700.000,00 | |
| 1.2.90 | | Pengadaan Peralatan Kerja | 4.000.000,00 | PBH |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | | | |
| 1.2.90 | 5.3. | Belanja Modal | 4.000.000,00 | |
| 1.2.91 | | Pengadaan Mebel | 2.000.000,00 | PAD |
| 1.2.91 | 5.3. | Belanja Modal | 2.000.000,00 | |
| 1.2.92 | | Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel | 3.000.000,00 | PAD |
| 1.2.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 1.2.94 | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 3.000.000,00 | PAD |
| 1.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 1.2.95 | | Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja | 3.000.000,00 | PAD |
| 1.2.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 1.2.99 | | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 9.870.000,00 | PAD |
| 1.2.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.870.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 8.013.260,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 4.193.260,00 | DDS, PBP |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.193.260,00 | |
| 1.3.03 | | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 3.110.000,00 | PAD |
| 1.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.110.000,00 | |
| 1.3.90 | | Penyusunan Monografi Desa | 710.000,00 | PBH |
| 1.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 710.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 145.310.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 4.755.000,00 | DDS, PBH |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.755.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 16.720.000,00 | DDS, PBH |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.720.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 10.000.000,00 | PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 14.400.000,00 | PAD, PBP |
| 1.4.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.400.000,00 | |
| 1.4.06 | | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 3.720.000,00 | PBH |
| 1.4.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.720.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2.060.000,00 | PAD |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.060.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 27.385.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.385.000,00 | |
| 1.4.91 | | Pengisian Perangkat Desa | 54.920.000,00 | PBH |
| 1.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 54.920.000,00 | |
| 1.4.92 | | Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa | 11.350.000,00 | PAD |
| 1.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.350.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 704.623.056,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | | | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 4.623.056,00 | PAD |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.623.056,00 | |
| 1.5.99 | | Lain-lain Sub Bidang Pertanahan | 700.000.000,00 | PBP |
| 1.5.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 147.720.000,00 | |
| 1.5.99 | 5.3. | Belanja Modal | 552.280.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | 950.981.000,00 | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 60.770.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Medrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 36.150.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.150.000,00 | |
| 2.1.08 | | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 11.820.000,00 | DDS |
| 2.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.820.000,00 | |
| 2.1.09 | | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 12.800.000,00 | DDS |
| 2.1.09 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.800.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 407.300.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, deb) | 54.640.000,00 | DDS |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 54.640.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif) | 68.140.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 68.140.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 29.365.000,00 | DDS |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 29.365.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 132.540.000,00 | DDS, PBP |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 132.540.000,00 | |
| 2.2.91 | | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas) | 35.075.000,00 | DDS |
| 2.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.075.000,00 | |
| 2.2.94 | | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siwa PAUD | 41.400.000,00 | DDS |
| 2.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.400.000,00 | |
| 2.2.98 | | Insentif kader kesehatan/KB | 46.140.000,00 | DDS |
| 2.2.98 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 46.140.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.600.000,00 | |
| 2.3.08 | | Pemeliharaan Embung Milik Desa | 3.600.000,00 | DDS |
| 2.3.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 104.875.000,00 | |
| 2.4.17 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **) | 17.375.000,00 | DDS |
| 2.4.17 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.375.000,00 | |
| 2.4.91 | | Pemberian stimulan jamban sehat | 52.500.000,00 | PBP |
| 2.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 52.500.000,00 | |
| 2.4.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 35.000.000,00 | DLL |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | |
| 2.5. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 8.771.000,00 | |
| 2.5.91 | | Pengelolaan Wana Desa | 8.771.000,00 | DDS |
| 2.5.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.771.000,00 | |
| 2.8. | | Sub Bidang Pariwisata | 385.645.000,00 | |
| 2.8.03 | | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 59.570.000,00 | DDS |
| 2.8.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 59.570.000,00 | |
| 2.8.90 | | Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata | 270.075.000,00 | DDS |
| 2.8.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 270.075.000,00 | |
| 2.8.92 | | Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten | 36.000.000,00 | PBH |
| 2.8.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.000.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>160.395.302,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 13.595.000,00 | |
| 3.1.03 | | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 6.800.000,00 | PAD |
| 3.1.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.800.000,00 | |
| 3.1.90 | | Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana | 4.340.000,00 | PAD |
| 3.1.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.340.000,00 | |
| 3.1.93 | | Pembinaan Jaga Warga | 2.455.000,00 | DLL |
| 3.1.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.455.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 38.050.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 4.725.000,00 | PAD |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.725.000,00 | |
| 3.2.04 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa | 3.800.000,00 | PAD |
| 3.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.800.000,00 | |
| 3.2.91 | | Pengembangan kehidupan sosial keagamaan | 23.525.000,00 | PAD |
| 3.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.525.000,00 | |
| 3.2.96 | | Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya | 6.000.000,00 | PAD |
| 3.2.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 15.020.000,00 | |
| 3.3.90 | | Pelaksanaan peringatan hari besar nasional | 5.825.000,00 | PAD |
| 3.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.825.000,00 | |
| 3.3.93 | | Operasional Karang Taruna | 9.195.000,00 | PAD |
| 3.3.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.195.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 93.730.302,00 | |
| 3.4.04 | | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 2.691.302,00 | DLL |
| 3.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.691.302,00 | |
| 3.4.92 | | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) | 2.809.000,00 | DDS |
| 3.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.809.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | | | |
| 3.4.94 | | Pembinaan RT/RW | 17.890.000,00 | PSH |
| 3.4.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.890.000,00 | |
| 3.4.95 | | Operasional LPMD dan/atau LPMP | 40.715.000,00 | PSH |
| 3.4.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 40.715.000,00 | |
| 3.4.96 | | Operasional PKK | 22.725.000,00 | PAD |
| 3.4.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 22.725.000,00 | |
| 3.4.99 | | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 6.900.000,00 | PAD |
| 3.4.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.900.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>1.188.634.000,00</u> | |
| 4.1. | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 751.050.000,00 | |
| 4.1.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 751.050.000,00 | DDS, PBP |
| 4.1.99 | 5.3. | Belanja Modal | 751.050.000,00 | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 320.014.000,00 | |
| 4.2.03 | | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 120.075.000,00 | DDS |
| 4.2.03 | 5.3. | Belanja Modal | 120.075.000,00 | |
| 4.2.92 | | Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan | 199.939.000,00 | DDS |
| 4.2.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 199.939.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 23.425.000,00 | |
| 4.4.03 | | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) | 2.525.000,00 | DDS |
| 4.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.525.000,00 | |
| 4.4.92 | | Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa | 14.750.000,00 | DDS |
| 4.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.750.000,00 | |
| 4.4.96 | | Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja | 3.075.000,00 | DDS |
| 4.4.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.075.000,00 | |
| 4.4.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 3.075.000,00 | DDS |
| 4.4.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.075.000,00 | |
| 4.5. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 34.305.000,00 | |
| 4.5.01 | | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 9.450.000,00 | DDS |
| 4.5.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.450.000,00 | |
| 4.5.02 | | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 3.350.000,00 | DDS |
| 4.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.350.000,00 | |
| 4.5.90 | | Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion | 21.505.000,00 | DDS |
| 4.5.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.505.000,00 | |
| 4.6. | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 13.300.000,00 | |
| 4.6.02 | | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 7.350.000,00 | PBP |
| 4.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.350.000,00 | |
| 4.6.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 5.950.000,00 | DDS |
| 4.6.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.950.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------------------------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7. | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 46.640.000,00 | |
| 4.7.91 | | Pengelolaan pasar desa | 25.140.000,00 | DDs |
| 4.7.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.140.000,00 | |
| 4.7.99 | | Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 21.400.000,00 | DDs |
| 4.7.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.400.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>162.240.000,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 6.240.000,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 6.240.000,00 | DDs |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 6.240.000,00 | |
| 5.2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 2.000.000,00 | |
| 5.2.00 | | Penanganan Keadaan Darurat | 2.000.000,00 | DDs |
| 5.2.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 144.000.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 144.000.000,00 | DDs |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 144.000.000,00 | |
| JUMLAH BELANJA | | | 4.485.365.531,00 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | | 41.957.899,00 | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 58.042.101,00 | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | |
| PEMBIAYAAN NETTC | | | (41.957.899,00) | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | | | 0,00 | |





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS

ꦏꦤꦤꦮꦸꦠꦺꦥꦸꦱ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Lamantepus.gunungkidulkab.go.id; Posel kecamatantepus@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

PANEWU TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tepus tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tepus
pada tanggal 19 Desember 2024



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA KALURAHAN SIDOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

LEMBAR KERJA EVALUASI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Kalurahan : Sidoharjo
 Kapanewon : Tepus
 Kabupaten : Gunungkidul

| No | Aspek Evaluasi | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-----|--|------------|-------|--|---|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Legalitas dan Administratif | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap. | √ | | Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim | Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| | | | | | g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan. |
| 1.2 | Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu. | | √ | 1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal | Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal. |
| 1.3 | Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang APB Kalurahan. | √ | | 1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah. | Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mecermati dan menyepakati rancangan perkal. |
| 1.4 | Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya | √ | | Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi. | Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya. |

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Adanya keterlambatan dalam proses/tahapan Penyusunan ABPKal TA 2025, Kesepakatan Bersama Bamuskal paling lambat minggu kedua Bulan November, dan disampaikan kepada Panewu paling lambat 3 hari setelah kesepakatan bersama Bamuskal dan Lurah;
2. Agar menambahkan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
3. KONSIDERAN nomor urut 1 (satu), agar dipindah ke nomor urut 5 (lima)

| No. | Aspek Evaluasi | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-----|---|------------|-------|---|---|
| | | Ya | Tidak | | |
| 2 | Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran | | | | |
| 2.1 | Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal. | √ | | - Perkal RKPKal | |
| | Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada | √ | | - Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan | Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain |
| | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | √ | | - data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya | |
| | Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah. | √ | | | |
| | Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | √ | | | |
| | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | √ | | | |
| | Apakah semua kegiatan Belanja | √ | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan | | | | |
| Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) | | √ | | |
| Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal. | √ | | | |
| Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan. | √ | | | |
| Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan. | √ | | | |
| Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW | √ | | | |
| Apakah output kegiatan rasional dan terukur | √ | | | |
| Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa. | √ | | | |
| Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi | √ | | | |
| Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD | √ | | | |
| Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan | √ | | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ | √ | | | |
| Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan | √ | | | |
| Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan | | √ | | |
| Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan | | √ | | |
| Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan | √ | | | |
| Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha | √ | | | |
| Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya | √ | | | |
| Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya | √ | | | |
| Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya. | √ | | | |
| | | | | |

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Pemerintah Kalurahan agar menyesuaikan Sumberdana dengan keperuntukannya, sesuai pagu indikatif, sesuai SHBJ dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Lurah agar membuat dokumen pendukung sebagai dasar penganggaran APBKal :
 - Peraturan Kalurahan/Lurah tentang Penyertaan Modal Bumkal
 - Perubahan Peraturan Kalurahan/Lurah tentang Penyertaan Modal Bumkalma
 - Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, dan
 - Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan
 - Dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan
3. Semua kegiatan fisik yang tercantum dalam APBKal Tahun Anggaran 2025, agar mencantumkan lokasi, volume dan waktu pelaksanaan (spesifik) pada RAB kegiatan;
4. Untuk perhitungan Silpa tahun 2024 untuk disesuaikan dengan kondisi yang terupdate dan penggunaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan tanggal : 19 Desember 2024

Hasil Evaluasi :

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Kalurahan



Ketua Tim Evaluasi,

Subiyantoro
Panewu